

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Aying, 2002.

_____. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Ali Rido. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni*, Bandung, 2004.

Anwar Borahima. *Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2010.

Asikin Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

Chidir Ali. *Badan Hukum*, Penerbit; Alumni, Jakarta, 1987.

Chatamarrasjid Ais. *Badan Hukum Yayasan (Edisi Revisi)*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2006.

Darji Darmodihardjo. *Hyronimnus Rhiti, Filsafat Hukum; Edisi Lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Jogjakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.

Ellise T Sulastini dan Wahyu Aditya. *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2002.

Fredrik Hagmann. *Beneficial Ownership – A concept in Indetity Crisis*, Lund University 2017

G.H.S Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1980.

_____. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1996.

- Gatot Supramono. *Hukum Yayasan di Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.*
- H.R Otje Salman S. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- H.R Purwoto S. Gandasubrata. *Renungan Hukum*, IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1998.
- Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia. Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2008 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Herlien Budiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- J.S.C Simorangkir. *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 2000.
- Jhony Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, 2006.
- Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni,1993.
- Liliana Tedjosaputro. *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, Semarang: CV. Agung, 1991.
- Muh. Erwin. *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana: Jakarta, 2005.
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Salim, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan teori hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sentosa Sembiring. *Himpunan PerUndang-Undangan Republik Indonesia Tentang Yayasan serta Penjelesannnya*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.

Setiawan. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1992.

Suyud Margono. *Aspek Hukum Yayasan: antara Fungsi Karitatif & Kegiatan Komersial*, cetakan Pertama, (Jakarta: Novinda Pustaka Mandiri, 2002

—————. *Badan Hukum Yayasan: dinamika praktek, efektivitas & regulasi di Indonesia*, Jakarta, 2015.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Cetakan ke-3, Jakarta, 1990.

Wawan Setiawan. *Pelanggaran Kode Etik Profesi di Kalangan Notaris dan Upaya Penyelesaian*, Makalah Seminar Nasional tentang Kejahatan di Lingkungan Profesi yang diadakan oleh Program S2 Universitas Diponegoro, 1992.

B. Jurnal Ilmiah

Anthony Tjono dan R. Arja Sadjiarto. “*Penentuan Beneficial Owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda*”, *Tax and Accounting Review*, Vol. 3., No. 2, 2013.

Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi. *Hukum Yayasan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2001, Tentang Yayasan*, Indonesia Center Publishing.

Ateng Syafrudin. *Menuju Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. *Jurnal Pro Justitia*, Universitas Parahyangan, Bandung, Edisi IV, Tahun 2000 ditulis oleh I Made Hendra Kusuma dalam *Varia Pengadilan Majalah Hukum* Tahun XXIX No.340 Maret 2014.

Dyah Hapsari Prananingrum. *Persoalan Kepastian dan Kemanfaatan dalam Perspektif Hukum Yayasan*, *Jurnal Ilmu Hukum refleksi hukum* edisi Oktober 2010.

Ellise T Sulastini dan Wahyu Aditya. *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2002.

Erik Vermeulen. *Beneficial Ownership and Control: A Comparative Study- Disclosure Information and Enforcement*, OECD Corporate Governance Working Papers, No. 7, OECD Publishing, 2013.

Fred BG Tumbuan. *Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksud UU Yayasan*, Makalah, Fakultas Hukum Unika Atmajaya, Jakarta, 2002.

Kusrini Purwijanti dan Iman Prihandono. *Pengaturan Karakteristik Beneficiary Ownership di Indonesia*, Jurnal Notaire: vol.1, No. 1, Juni 2018.

Sri Suwitri. *Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi*, 4 Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik, 2017.

Teresia Din. *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19 Nomor 2, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerglijk Wetboek*)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Website

Darrussalam. *Beneficial Owner Dalam Konteks Perpres no 13 Tahun 2018 dan Pajak*, <http://news.ddtc.co.id> diakses pada tanggal 5 Oktober 2020.

Financial Action Task Force, '*FATF Guidance Transparency and Beneficial Ownership*', <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf>. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2020

Financial Action Task Force, "*International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations*". [http://www.fatf.gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/fatf Recommendations.pdf](http://www.fatf.gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/fatf_Recommendations.pdf) diakses pada tanggal 16 Oktober 2020

<http://www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/attachments/638sumbe%20ke-wenangan.pdf> diakses pada tanggal 10 Oktober 2020.

<https://news.detik.com/berita/d-3429110/kapolri-sebut-ketua-yayasan-keadilan-untuk-semua-jadi-tersangka> dikses pada Tanggal 18 Oktober 2020

<https://nasional.kontan.co.id/news/pertumbuhan-ekonomi-capai-54-tahun-2018?page=all> diakses Pada Tanggal 18 Oktober 2020

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170222152508-12-195349/tersangka-dugaan-pencucian-dana-aksi-411-dan-212-bertambah> diakses pada Tanggal 18 Oktober 2020

<https://jateng.antaranews.com/berita/272151/terdakwa-penggelapan-uang-yayasan-umk-divonis-35-tahun> diakses pada Tanggal 28 Desember 2020

<https://www.kamusbesar.com/legal-owner> diakses pada Tanggal 18 Oktober 2020.

Maryati Abdullah, "*Menguak Beneficial Ownership, Membongkar Kamufase Ekonomi*". <https://pwp-indonesia.org/id/155817/menguak-beneficial-ownership-membongkar-kamufase-ekonomi>. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2020

Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, "*Beneficial Owner Dalam OECD Model Tax Convention (MTC): Sejarah Dan Perkembangan Terkini*". <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/beneficialownership-aplikasi-dalam-tax-treaty.pdf> diakses pada tanggal 16 Oktober 2020.

The Black Law Dictionary, <https://thelawdictionary.org/beneficial-owner> , diakses pada tanggal 15 Oktober 2020.